

SKRIPSI

**KEDUDUKAN SAKSI PELAKU (*JUSTICE COLLABORATOR*)
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DITINJAU DARI UNCAC TAHUN 2003 DAN HUKUM NASIONAL**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)

Pembimbing:

Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H.,M.H

Felia Hermayenti, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

	No. Alumni Universitas		Muhammad Fadli. M		No. Alumni Fakultas	
	a. Tempat/Tgl Lahir	: Bukittinggi/ 23 September 2002	f. Tanggal Lulus		: 11 Juni 2026	
	b. Nama Orang Tua	: Muslim dan Evarida	g. Predikat Lulus		: Dengan Pujian	
	c. Fakultas	: Hukum	h. Lama Studi		: 3 Tahun 10 bulan	
	d. PK	: Hukum Pidana	i. IPK		: 3,83	
	e. NIM	: 2210112009	j. Alamat		: Padang Panjang	

**KEDUDUKAN SAKSI PELAKU (*JUSTICE COLLABORATOR*) DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU
DARI UNCAC TAHUN 2003 DAN HUKUM NASIONAL**

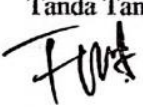
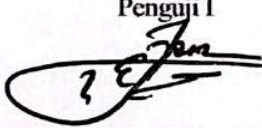
*Muhammad Fadli. M, 2210112009, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum,
Universitas Andalas, 84 halaman, 2026*

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara, sehingga pemberantasannya memerlukan pembuktian efektif melalui keterangan *Justice Collaborator* (JC). Dalam praktiknya, JC sering mengalami persoalan pemenuhan hak. Sebagai negara ratifikasi UNCAC 2003, Indonesia berkewajiban mengoptimalkan pemenuhan hak tersebut melalui hukum nasional. Penelitian ini menganalisis dua rumusan masalah, yaitu pengaturan dan kedudukan JC dalam perundang-undangan, serta kesesuaian pengaturan JC di Indonesia dengan ketentuan UNCAC 2003. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan dokumen yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan JC telah diakomodasi secara terperinci dalam berbagai regulasi nasional, seperti UU Perlindungan Saksi dan Korban, KUHP, SEMA No. 4/2011, Peraturan Bersama 2011, dan PP No. 24/2025, yang masing-masing mengatur hak dasar, prosedural, pedoman hakim, pernyataan persepsi antarlembaga hingga penanganan secara khusus yang lebih rinci. Berdasarkan perbandingan empat aspek dengan UNCAC tahun 2003, pengaturan di Indonesia telah sesuai pada aspek definisi/kriteria dan mitigasi hukuman, namun belum sesuai pada aspek kekebalan penuntutan serta perlindungan lintas negara. Secara garis besar, Indonesia telah mengimplementasikan mandat UNCAC 2003, tetapi opsi kekebalan penuntutan (dengan mekanisme kekebalan bersyarat) dan perlindungan JC lintas negara perlu dipertimbangkan dalam hukum nasional demi optimalisasi pemenuhan hak dan proteksi JC dengan harapan dapat memberantas tindak pidana tertentu terutama pada kasus tindak pidana korupsi yang lebih besar di Indonesia maupun Internasional.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, *Justice Collaborator*, Pemenuhan Hak, UNCAC Tahun 2003, Hukum Nasional.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 11 Juni 2026.
Penguji,

Tanda Tangan 	Penguji I 	Penguji II 
Muhammad Fadli. M	Efren Nova, S.H., M.H	Dr. A. Arzal Rias, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Pidana: **Riki Afrizal, S.H., M.H**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	Alumni University Number	Muhammad Fadli. M	Alumni Faculty Number
	a. Place/Date of Birth : Bukittinggi/ 23 September 2002 b. Parents Name : Muslim and Evarida c. Faculty : Law d. Concentration : Criminal Law e. NIM : 2210112009	f. Graduation Date : 11 th Juni 2026 g. Pass Predicate : With Honors h. Length of Study : 3 years 10 months i. GPA : 3,83 j. Address : Padang Panjang	

**THE POSITION OF PERPETRATOR WITNESSES (JUSTICE COLLABORATORS)
IN COMBATING CORRUPTION CRIMES VIEWED FROM
THE 2003 UNCAC AND NATIONAL LAW**

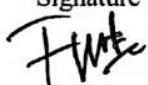
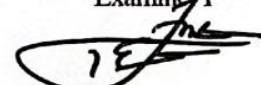
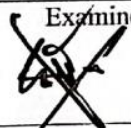
*Muhammad Fadli. M, 2210112009, Specialization Program in Criminal Law (PK IV), Faculty of Law,
Andalas University, 84 pages, 2026*

ABSTRACT

Corruption crimes are offenses that cause significant harm to the state, thus their eradication requires effective evidence through the testimony of a Justice Collaborator (JC). In practice, JCs often face issues in fulfilling their rights. As a country that ratified the 2003 UNCAC, Indonesia is obliged to optimize the fulfillment of these rights through national law. This study analyzes two problem formulations, namely the regulation and position of JCs in legislation, and the conformity of JC regulations in Indonesia with the provisions of the 2003 UNCAC. The method used is normative juridical research with a descriptive-analytical nature through statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through literature and document studies and were analyzed qualitatively. The research findings indicate that the position of JC has been accommodated in detail within various national regulations, such as the Witness and Victim Protection Law, the Criminal Procedure Code (KUHAP), SEMA No. 4/2011, the 2011 Joint Regulation, and Government Regulation No. 24/2025, each of which governs basic rights, procedural matters, judicial guidelines, inter-agency perception harmonization, as well as more detailed special handling. Based on a comparison of four aspects with the 2003 UNCAC, regulations in Indonesia have been compliant in terms of definitions/criteria and sentence mitigation, but are not yet compliant in terms of prosecution immunity and cross-border protection. In general, Indonesia has implemented the mandate of the 2003 UNCAC, but the option of prosecution immunity (with a conditional immunity mechanism) and cross-border JC protection need to be considered in national law to optimize the fulfillment of rights and JC protection with the hope of eradicating certain criminal acts, especially in cases of major corruption offenses both in Indonesia and internationally.

Keywords: Corruption Offenses, Justice Collaborator, Fulfillment of Right, UNCAC 2003, Hukum Nasional.

This Minor Thesis has been successfully defended and regarded to graduate at Juni 11th 2026
Examiner,

Signature 	Examiner I 	Examiner II 
Muhammad Fadli. M	Efren Nova, S.H., M.H	Dr. Afrizal Rias, S.H., M.H

Acquainted,

Head of the Department of Criminal Law: **Riki Afrizal, S.H., M.H**


Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: